

PKN DALAM KURIKULUM 2013

Desy Nurhidayah¹
Euis Siti Aisyah²
Janjan Nurjannah³

desyn761@gmail.com¹
euissitiaisyah13@gmail.com²
janjannurjanah19@gmail.com³

Universitas Suryakencana

Abstrak

Telah terjadi beberapa perubahan kurikulum di Indonesia yakni Kurikulum Berbasis Kompetensi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada tahun 2006, yang kemudian disempurnakan oleh Kurikulum 2013. Pada semua mata pelajaran tidak terkecuali dengan PPKn, peserta didik diharapkan untuk memahami isi materi pelajaran, aktif dalam berdiskusi serta memiliki sopan santun disiplin yang tinggi. Kurikulum PPKn sendiri adalah acuan mewujudkan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang merangsang peserta didik agar peserta didik berfikir kritis, rasional, dan kreatif. Dalam kurikulum 2013 ini, pasti ada kelebihan dan kekurangan pada penerapan di sekolah.

Kata Kunci: PPKn, Kurikulum 2013, Implementasi, Kekurangan dan Kelebihan.

PENDAHULUAN

Untuk menghadapi masalah yang akan dihadapi di masa mendatang, tentu saja harus diadakan penataan terhadap sistem pendidikan secara utuh dan menyeluruh. Pendidikan sendiri dapat diartikan sebagai kehidupan, dalam kata lain kegiatan belajar harus dapat membekali peserta didik dengan kecakapan lingkungan kehidupan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan terus menerus dilakukan baik secara konvensional maupun inovatif. Hal tersebut lebih difokuskan setelah amanat bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan mutu pada jenjang jenis pendidikan termasuk mata pelajaran yang ada didalamnya.

Konsep pendidikan di Indonesia sendiri selalu berubah dengan tujuan untuk mencari dan menemukan susunan terbaik seiring perubahan dan

perkembangan zaman di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah tercatat sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 serta yang terbaru adalah kurikulum 2013. Perubahan kurikulum mencakup isi dan mata pelajaran termasuk dalam pelajaran yang selalu mengalami perubahan adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pada kurikulum sebelumnya pada tahun 2006, PPKn dikenal sebagai Pendidikan Kewarganegaraan. Pada awalnya PPKn disebut dengan pelajaran Civic pada tahun 1962. Perubahan nama pelajaran ini menunjukkan sifat kurikulum yang dinamis.

Pada kurikulum bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warganegara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kurikulum juga sebagai alat pendidikan agar memiliki kompetensi kognitif, afektif dan psikomotor untuk peserta didik.

Salah satu langkah dalam penyusunan kurikulum 2013 adalah penataan ulang nama pelajaran PKn menjadi PPKn, dengan rincian yaitu 1) Mengubah nama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), 2) Menempatkan pelajaran PPKn sebagian utuh dari kelompok mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan, 3) Mengorganisasikan SK-KD dan indikator PPKn secara nasional dengan memperkuat nilai dan moral dari pancasila, nilai dan norma undang-undang 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta wawasan dan komitmen NKRI, 4) Memantapkan pengembangan peserta didik dalam dimensi pengetahuan kewarganegaraan, sikap kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, keteguhan kewarganegaraan, komitmen kewarganegaraan dan kompetensi kewarganegaraan, 5) Mengembangkan dan menerapkan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik PPKn yang berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik sebagai warga negara yang cerdas baik

secara utuh, 6) Mengembangkan dan menerapkan berbagai model penilaian proses pembelajaran hasil belajar PPKn. Jika saja hal-hal diatas diimplementasikan dengan baik dan sungguh-sungguh, besar kemungkinan kurikulum sebagai alat pendidikan dalam hal kognitif, afektif dan psikomotor akan terealisasikan pembelajaran di sekolah dan kemampuan guru dalam menyampaikan isi dari kurikulum menjadi penentu tujuan kurikulum ini.

LANDASAN TEORI

Kurikulum

Secara umum, pengertian kurikulum adalah seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar dan pengertian lainnya, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa latin, yakni *curriculae* yang artinya adalah jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pada waktu itu, pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh peserta didik yang bertujuan untuk memperoleh ijazah.

Banyak para ahli yang merumuskan definisi dari kurikulum. Definisi menurut Beauchamp (1968), kurikulum adalah dokumen tertulis yang kandungannya berisi mata pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik dengan melalui berbagai mata pelajaran, pilhan disiplin ilmu, rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa kurikulum sendiri memuat isi dan materi pelajaran yang dimana sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan yang akan bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran (*subject matter*) sendiri dipandang sebagai pengalaman orangtua atau orang-orang yang pandai pada masa lampau, yang telah disusun secara sistematis dan logis.

Adapun Menurut Romime (1995), *curriculum is interpretend to mean all of the organized course, activities, and experiences which pupils have under direction of the school, whether in the class room or not*. Pengertian ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan kurikulum tidak terbatas dalam ruang kelas saja, melainkan mencakup kegiatan-kegiatan diluar kelas. Kurikulum dianggap sebagai program dari pendidikan untuk membelajarkan peserta didik. Dengan program tersebut, peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar, sehingga terjadi perubahan dan perkembangan dalam tingkah laku. Kurikulum harus disusun sedemikian rupa agar menarik untuk peserta didik sehingga tercapainya tujuan kurikulum itu sendiri. Mengacu pada definisi menurut Romime dapat disimpulkan jika kurikulum tidak sebatas mata pelajaran saja tetapi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik.

Kurikulum 2013 ini dipengaruhi beberapa faktor yakni tantangan internal dan tantangan eksternal. Pertama, adanya faktor tantangan internal, antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tantangan internal lainnya dapat dikaitkan dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Saat ini jumlah penduduk Indonesia usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari usia tidak produktif (anak-anak berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas). Jumlah penduduk usia produktif diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-2035 mendatang pada saat angkanya mencapai 70%. Oleh sebab itu tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumberdaya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban.

Kedua, adanya tantangan eksternal, yang antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional.

Arus globalisasi akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern seperti dapat terlihat di *World Trade Organization (WTO)*, *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Community*, *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*, dan *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*. Tantangan eksternal juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, dimana pengaruh dan imbas tekno-sains serta mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan. Keikutsertaan Indonesia di dalam studi *International Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)* dan *Program for International Student Assessment (PISA)* sejak tahun 1999 juga menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia dapat dikatakan tidak sesuai dengan negara-negara lainnya yaitu dalam beberapa kali laporan yang dikeluarkan TIMSS dan PISA. Hal ini disebabkan antara lain banyaknya materi uji yang ditanyakan di TIMSS dan PISA tidak terdapat dalam kurikulum Indonesia.

Sejarah Kurikulum dan Pelajaran PPKN di Indonesia

Berdasarkan sejarah pendidikan di Indonesia, kurikulum mengalami beberapa kali perubahan mulai dari tahun 1947 yang diberi nama rencana pembelajaran 1947 yang menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat, lalu dilanjutkan pada tahun 1952 kurikulum ini diberi nama rencana pelajaran terurai 1952, tahun 1964 dengan nama rentjana pendidikan 1964. Selanjutnya kurikulum 1968 yang bertujuan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Tahun 1975 dengan nama satuan pelajaran yang menekankan konsep *Management By Objective (MBO)*, kurikulum 1984 dengan nama kurikulum 1975 yang disempurnakan yang menekankan siswa sebagai subjek belajar, kurikulum 1994,

tahun 2004 dengan sistem Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang menitik beratkan pada pengembangan kemampuan (kompetensi) melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada peserta didik yang kemudian berubah lagi pada tahun 2006 diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dimana dalam kurikulum ini guru sangat berperan aktif dalam menguasai proses pembelajaran didalam kelas, dan yang terbaru yaitu kurikulum 2013 yang berlaku mulai tahun ajaran 2013/2014 (Fitriya, 2014).

PPKn dalam Kurikulum 2013 serta Implementasinya

Sebagai mata pelajaran pada setiap sekolah di Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan telah mengalami perkembangan yang tidak stabil, baik dalam kemasan maupun substansinya. Hal tersebut dapat dilihat dalam substansi kurikulum PKn yang sering berubah dan disesuaikan dengan kepentingan negara. Secara historis, epistemologis dan pedagogis, pendidikan kewarganegaraan berkedudukan sebagai program kurikuler dimulai dengan diintroduksikannya mata pelajaran *Civics* dalam kurikulum SMA tahun 1962 yang berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Dept. P&K: 1962). Pada saat itu, mata pelajaran *Civics* atau *kewarganegaraan*, pada dasarnya memuat tentang pengalaman belajar yang dipilih dari disiplin ilmu sejarah, geografi, ekonomi, dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa (Somantri, 1969:7). Istilah *Civics* tersebut secara formal tidak ditemukan pada saat Kurikulum tahun 1957 maupun dalam Kurikulum tahun 1946. Namun jika dilihat dari lapangan dalam Kurikulum SMP dan SMA tahun 1957 terdapat mata pelajaran tata negara dan tata hukum, dan dalam kurikulum 1946 terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya berisi tentang pengetahuan mengenai pemerintahan. Kemudian dalam kurikulum tahun 1968 dan 1969 istilah *civics* dan Pendidikan Kewarganegaraan digunakan secara bertukar-pakai (*interchangeably*). Misalnya dalam Kurikulum SD 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara yang dipakai sebagai nama mata pelajaran, yang di

dalamnya tercakup mata pelajaran sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan *civics*. Dalam kurikulum SMP 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewarganegaraan yang berisi tentang sejarah Indonesia dan Konstitusi termasuk UUD 1945. Sedangkan dalam kurikulum SMA 1968 terdapat mata pelajaran Kewargaan Negara yang berisikan materi, terutama yang berkenaan dengan UUD 1945. Sementara itu dalam Kurikulum SPG 1969 mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara yang isinya terutama berkenaan dengan sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan dan hak asasi manusia menurut (Dept. P&K: 1968a; 1968b; 1968c; 1969) dan (Winataputra, 2006:1). Secara umum mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara membahas tentang nasionalisme, patriotisme, kenegaraan, etika, agama dan kebudayaan (Somantri, 2001:298)

Pada Kurikulum tahun 1975 istilah Pendidikan Kewargaan Negara berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau biasa disebut dengan P4. Perubahan ini sejalan dengan misi pendidikan di Indonesia yang diamanatkan oleh Tap. MPR II/MPR/1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA, SPG dan Sekolah Kejuruan. Mata pelajaran PMP ini terus dipertahankan baik istilah maupun isinya sampai dengan berlakunya Kurikulum 1984 yang pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 1975 (Depdikbud: 1975 a, b, c dan 1976). Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada masa itu berorientasi pada *value inculcation* dengan muatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (Winataputra dan Budimansyah, 2007:97)

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggariskan adanya muatan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan (Pasal 39), Kurikulum Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 1994 mengakomodasikan misi baru pendidikan tersebut dengan memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum PPKn 1994 mengorganisasikan materi pembelajarannya

bukan atas dasar rumusan butir-butir nilai P4, tetapi atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari P4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan spiral meluas atau *spiral of concept development*. Pendekatan ini mengartikulasikan sila-sila Pancasila dengan jabaran nilainya untuk setiap jenjang pendidikan dan kelas serta catur wulan dalam setiap kelas.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada masa ini karakteristiknya didominasi oleh proses *value incucation* dan *knowledge dissemination*. Hal tersebut dapat lihat dari materi pembelajarannya yang dikembangkan berdasarkan butir-butir setiap sila Pancasila. Tujuan pembelajarannya pun diarahkan untuk menanamkan sikap dan prilaku yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk memahami, menghayati dan meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berperilaku sehari-hari (Winataputra dan Budimansyah, 2007:97).

Dengan diberlakukannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, diberlakukan kurikulum yang dikenal dengan nama Kurikulum berbasis Kompetensi tahun 2004 dimana Pendidikan Kewarganegaraan berubah nama menjadi Kewarganegaraan. Tahun 2006 namanya berubah kembali menjadi Pendidikan Kewarganegaraan, di mana secara substansi tidak terdapat perubahan yang berarti, hanya kewenangan pengembangan kurikulum yang diserahkan pada masing-masing satuan pendidikan, maka kurikulum tahun 2006 ini dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Secara Konseptual istilah Pendidikan Kewarganegaraan dapat terangkum sebagai berikut : (a) Kewarganegaraan (1956), (b) Civics (1959), (c) Kewarganegaraan (1962), (d) Pendidikan Kewarganegaraan (1968), (e) Pendidikan Moral Pancasila (1975), (f) Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (1994), (g) Pendidikan Kewarganegaraan (UU No. 20 Tahun 2003), (h) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PP No. 24 Tahun 2016).

Sesuatu yang baru tentu mempunyai perbedaan dengan yang lama. Begitu pula kurikulum 2013 mempunyai perbedaan dengan KTSP. Berikut ini adalah perbedaan kurikulum 2013 dan KTSP.

Perbandingan Tata Kelola Pelaksanaan Kurikulum

Elemen	Ukuran Tata Kelola	KTSP 2006	Kurikulum 2013
Guru	Kewenangan	Hampir mutlak	Terbatas
	Kompetensi	Harus tinggi	Sebaiknya tinggi. Bagi yang rendah masih terbantu dengan adanya buku
	Bebasan	Berat	Ringan
	Efektifitas waktu untuk kegiatan pembelajaran	Rendah (banyak waktu untuk persiapan)	Tinggi
Buku	Peran penerbit	Besar	Kecil
	Variasi materi dan proses	Tinggi	Rendah
	Variasi harga / bebas siswa	Tinggi	Rendah
Siswa	Hasil pembelajaran	Tergantung sepenuhnya pada guru	Tidak sepenuhnya tergantung guru, tetapi juga buku yang disediakan pemerintah
Pemantauan	Titik Penyimpangan	Banyak	Sedikit
	Besar penyimpangan	Tinggi	Rendah
	Pengawasan	Sulit, hampir tidak mungkin	Mudah

Berikut ini adalah perbedaan antara Kurikulum 2013 dengan KTSP

No	Kurikulum 2013	KTSP
1	SKL (Standar Kompetensi Lulusan) ditentukan terlebih dahulu, melalui Permendikbud No 54 Tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan Standar Isi, yang berbentuk Kerangka Dasar Kurikulum, yang dituangkan dalam Permendikbud No 67, 68, 69, dan 70 Tahun 2013	Standar Isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas No 22 Tahun 2006. Setelah itu ditentukan SKL (Standar Kompetensi Lulusan) melalui Permendiknas No 23 Tahun 2006
2	Aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan soft skills dan hard skills yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan	Lebih menekankan pada aspek pengetahuan
3	Di jenjang SD Tematik Terpadu untuk kelas I-VI	di jenjang SD Tematik Terpadu untuk kelas I-III
4	Jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih	Jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih

	sedikit dibanding KTSP	banyak dibanding Kurikulum 2013
5	Proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran di jenjang SMP/SMA/SMK dilakukan dengan pendekatan ilmiah (saintific approach), yaitu standar proses dalam pembelajaran terdiri dari Mengamati, Menanya, Mengolah, Menyajikan, Menyimpulkan, dan Mencipta.	Standar proses dalam pembelajaran terdiri dari Eksplorasi, Elaborasi, dan Konfirmasi
6	TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) bukan sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai media pembelajaran	TIK sebagai mata pelajaran
7	Standar penilaian menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil.	Penilaiannya lebih dominan pada aspek pengetahuan
8	Pramuka menjadi ekstrakuler wajib	Pramuka bukan ekstrakurikuler wajib
9	Pemintan (Penjurusan) mulai kelas X untuk jenjang SMA/MA	Penjurusan mulai kelas XI
10	BK lebih menekankan mengembangkan potensi siswa	BK lebih pada menyelesaikan masalah siswa

Implementasi kurikulum adalah usaha bersama antara Pemerintah dengan pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

1. Pemerintah bertanggung jawab dalam mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum.
2. Pemerintah bertanggungjawab dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara nasional.
3. Pemerintah propinsi bertanggungjawab dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di propinsi terkait.
4. Pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum di kabupaten/kota terkait.

Dalam kurikulum 2013, guru dituntut untuk secara profesional merancang pembelajaran afektif dan bermakna, mengorganisasikan pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan.

Pertama, merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna. Implementasi kurikulum 2013 merupakan aktualisasi kurikulum, dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik. Hal tersebut menuntut keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan berbagai kegiatan sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan. Guru harus menyadari bahwa pembelajaran memiliki sifat yang sangat kompleks karena melibatkan aspek pedagogis, psikologi, dan didaktis secara bersamaan.

Kedua, mengorganisasikan pembelajaran. Implementasi kurikulum 2013 menuntut guru untuk mengorganisasikan pembelajaran secara efektif. Sedikitnya terdapat lima hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pengorganisasian pembelajaran dalam implementasi kurikulum 2013, yaitu pelaksanaan pembelajaran, pengadaan dan pembinaan tenaga ahli, pendayagunaan tenaga ahli dan sumber daya masyarakat, serta pengembangan dan penataan kebijakan.

Ketiga, memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran. Implementasi kurikulum 2013 berbasis kompetensi dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Pendekatan tersebut antara lain pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning*), bermain peran, pembelajaran partisipatif (*participative teaching and learning*), belajar tuntas (*mastery learning*), dan pembelajaran konstruktivisme (*constructivism teaching and learning*).

Keempat, melaksanakan pembelajaran, pembentukan kompetensi, dan karakter. Pembelajaran dalam menyelesaikan implementasi kurikulum 2013 merupakan keseluruhan proses belajar, pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik yang direncanakan. Untuk kepentingan tersebut maka kompetensi inti, kompetensi dasar, materi standart, indikator hasil belajar, dan waktu yang harus ditetapkan sesuai dengan kepentingan pembelajaran sehingga peserta didik diharapkan memperoleh kesempatan dan pengalaman belajar yang optimal. dalam hal ini, pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik

dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik. Pada umumnya kegiatan pembelajaran mencakup kegiatan awal atau pembukaan, kegiatan inti atau pembentukan kompetensi dan karakter, serta kegiatan akhir atau penutup.

Implementasi yang efektif merupakan hasil dari interaksi antara strategi implementasi, struktur kurikulum, tujuan pendidikan, dan kepemimpinan kepala sekolah. Oleh karena itu, pengoptimalan implementasi kurikulum 2013 diperlukan suatu upaya strategis untuk mensinergikan komponen-komponen tersebut, terutama guru dan kepala sekolah dalam membudayakan kurikulum.

Membudayakan kurikulum dapat diartikan bahwa implementasi kurikulum tersebut masuk dalam budaya sekolah, yang merefleksikan nilai-nilai dominan, norma-norma, dan keyakinan semua warga sekolah, baik peserta didik, guru, kepala sekolah, maupun tenaga kependidikan lain.

KESIMPULAN

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru yang diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di negara kita dewasa ini. Kurikulum 2013 bertujuan memberikan ilmu pengetahuan secara utuh kepada siswa dan tidak terpecah-pecah. Kurikulum ini menekankan pada keaktifan siswa untuk menemukan konsep pelajaran dengan guru berperan sebagai fasilitator. Nama PPKn sendiri sering berubah-ubah seperti Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pendidikan Kewarganegaraan PKN, dan kembali lagi menjadi PPKn.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyasa. 2013. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Aunurrahman. 2012. *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta
- Mulyadi, Yahya. *Belajar dan Pembelajaran*. Cianjur: Universitas Suryakencana
- Mashudi. 2016. *Kurikulum PPKN (2006-2013)*. [Online]. Diakses dari: hudianime.blogspot.com/2006/09/kurikulum-ppkn-2006-2013.html?m=

Intan. 2013. *Makalah Kurikulum 2013*. [Online]. Diakses dari:
<http://intanelmumtaz.blogspot.com/2013/12/makalah-implementasi-kurikulum-2013.html>